

**LAPORAN KEGIATAN KOMISI I DPR RI
DALAM MASA PERSIDANGAN IV TAHUN SIDANG 2022-2023
TANGGAL 10 JANUARI – 13 MARET 2023
(Masa Sidang Mulai Tanggal 14 Maret – 13 April 2023
dan Masa Reses Mulai Tanggal 14 April 2023 – 15 Mei 2023)**

Berdasarkan Pasal 98 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah *juncto* Pasal 59 Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2020 tentang Tata Tertib menjelaskan tentang tugas Komisi dalam bidang pembentukan undang-undang (legislasi), anggaran, dan pengawasan.

Adapun kegiatan yang telah dilaksanakan oleh Komisi I DPR RI pada Masa Persidangan IV Tahun Sidang 2022-2023 adalah sebagai berikut:

I. Kinerja Fungsi Legislasi

A. RUU USUL PEMERINTAH

Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE)

Terkait dengan RUU tentang Perubahan Kedua atas UU ITE, pada masa Persidangan IV Tahun Sidang 2022-2023, Komisi I DPR RI telah melaksanakan:

1. RDPU dengan LSM, yaitu:
 - a. Asosiasi Fintech Indonesia (AFTECH);
 - b. Amnesty Internasional;
 - c. SAFEnet; dan
 - d. AJI (Aliansi Jurnalis Independen)dalam rangka mendapatkan masukan terhadap RUU tentang Perubahan Kedua atas UU ITE.
2. Raker dengan Pemerintah (Menkominfo dan Menkumham) pada tanggal 10 April 2023 dalam rangka:
 - a. pandangan Fraksi-Fraksi terhadap RUU tentang Perubahan Kedua atas UU ITE;
 - b. pembahasan mekanisme dan jadwal pembahasan; dan

c. pembahasan materi DIM RUU tentang Perubahan Kedua atas UU ITE.



Gambar 1 RDPU dengan LSM terkait RUU ITE

Pada Raker tersebut di atas, Rapat memutuskan untuk membentuk Panitia Kerja (Panja) Perubahan Kedua atas UU ITE dan menugaskan Panja untuk membahas materi DIM RUU beserta penjelasannya dan melaprkkan hasil kerjanya dalam Raker Komisi I DPR RI dengan Pemerintah.

B. RUU USUL INISIATIF DPR RI

Penyusunan RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran (RUU Penyiaran)

Pada Masa Persidangan IV Tahun Sidang 2022-2023, Panja Perumusan RUU Penyiaran Komisi I DPR RI melanjutkan penyusunan draft RUU Penyiaran dan menargetkan akan melaporkan hasil kerja kepada Rapat Intern Komisi I DPR RI pada MP V TS 2022-2023. Selanjutnya Komisi I DPR RI akan menyampaikannya kepada Baleg DPR RI untuk diharmonisasi.



Gambar 2 Rapat Intern Panja Perumusan RUU Penyiaran

C. RUU KUMULATIF TERBUKA

RUU tentang pengesahan Persetujuan antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Republik India mengenai Kerja Sama dalam Bidang Pertahanan (*Agreement between the Government of the Republic of Indonesia and the Government of the Republic of India concerning Cooperation the Field of Defence*).

Pada MP IV TS 2022-2023, Komisi I DPR RI telah menjadwalkan Raker dengan Pemerintah (Menhan, Menlu, dan Menkumham) dalam rangka Pembicaraan Tingkat I untuk pembahasan dan dilanjutkan dengan pengambilan keputusan terhadap RUU tentang pengesahan Persetujuan antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah

Republik India mengenai Kerja Sama dalam Bidang Pertahanan (*Agreement between the Government of the Republic of Indonesia and the Government of the Republic of India concerning Cooperation the Field of Defence*) pada tanggal 3 April 2023, namun sehubungan berhalangnya pihak Pemerintah (Menhan, Menlu, dan Menkumham), Komisi I DPR RI memutuskan untuk menunda Raker dan akan menjadwalkannya kembali pada MP V TS 2022-2023.

II. Kinerja Fungsi Anggaran

Pada Masa Sidang IV TS. 2022-2023 belum terdapat penjadwalan Rapat anggaran dari Badan Anggaran DPR RI.

III. Kinerja Fungsi Pengawasan

A. Raker/RDP Komisi I DPR RI dengan Mitra Kerja komisi I DPR RI

Pada MP IV TS 2022-2023, Komisi I DPR RI telah melaksanakan Raker/RDP dengan Mitra Kerja Komisi I DPR RI, sebagai berikut:

1. RDP Komisi I DPR RI dengan Dirjen Renhan Kemhan, Asrenum Panglima TNI, Asrena KASAD, Asrena KASAL, dan Asrena KASAU pada tanggal 28 Maret 2023 yang dilaksanakan secara tertutup, dengan agenda:
 - a. Kebijakan strategis Indhan yang mampu menciptakan iklim kondusif bagi pengembangan Indhan nasional;
 - b. Kinerja holding BUMN Indhan untuk kepentingan bangsa dan negara;
 - c. Urgensi revitalisasi Indhan menuju Indhan yang unggul dan yang berdaya saing;
 - d. Tinjauan Indhan dari sisi SWOT dan/atau SWOC; dan
 - e. Pendanaan untuk biaya investasi Indhan yang berdaya saing
2. Raker Komisi I DPR RI dengan Kepala BSSN pada tanggal 29 Maret 2023 dalam rangka membahas rencana kerja situasi keamanan siber Indonesia pada setiap tahapan Pemilu 2024; Maturitas keamanan siber (*cyber security maturity*) pada K/L; dan Peran negara dalam ruang siber, dengan sifat rapat tertutup.
3. Raker Komisi I DPR RI dengan Menhan dan Panglima TNI pada tanggal 3 April 2023 dalam rangka membahas persetujuan Penerimaan Hibah Alpalhankam dari Luar Negeri.



Gambar 3 Pimpinan Komisi I DPR RI dalam Raker dengan Kemhan dan TNI



Gambar 5 Mitra Kerja Komisi I DPR RI



Gambar 4 Dirjen Renhan dan Panglima TNI

4. RDP Komisi I DPR RI dengan Gubernur Lemhannas pada tanggal 4 April 2023 dalam rangka mengetahui kajian eskalasi politik Indonesia di Tahun 2023-2024, kajian persoalan keamanan di Papua; dan kajian atas kesiapan ketahanan nasional dalam menghadapi dinamika global, dengan Rapat bersifat tertutup.
5. Raker Komisi I DPR RI dengan Kepala BIN pada tanggal 12 April 2023 dalam rangka membahas eskalasi politik Indonesia di tahun 2023-2024 dan persoalan keamanan di Papua. Raker dilaksanakan secara tertutup.

B. Uji Kepatutan dan Kelayakan Calon Anggota Dewas LPP TVRI Periode 2022-2027

Dalam rangka menindaklanjuti Keputusan Rapat konsultasi pengganti rapat Badan Musyawarah tanggal 7 Februari 2023 yang telah menugaskan Komisi I DPR RI untuk membahas Calon Anggota Dewan Pengawas Lembaga Penyiaran Publik Televisi Republik Indonesia Periode 2022-2027, Komisi I DPR RI melaksanakan Uji kepatutan dan Kelayakan terhadap 15 (lima belas) Calon Anggota Dewan Pengawas Lembaga Penyiaran Publik Televisi Republik Indonesia Periode 2022-2027 pada tanggal 5 April 2023. Setelah melaksanakan Uji kepatutan dan Kelayakan tersebut, Komisi I DPR RI melaksanakan Rapat Intern dan telah memutuskan:

1. Menyetakati dan menetapkan 5 (lima) orang Calon Anggota Dewas LPP TVRI Periode 2022-2027 berdasarkan musyawarah untuk mufakat dengan urutan nama berdasarkan abjad, yaitu:
 - a) Agnes Irwanti (Unsur Masyarakat)
 - b) Agus Sudibyo (Unsur Pemerintah)
 - c) Danang Sangga Buwana (Unsur Masyarakat)
 - d) Hardly Stefano Fenelon (Unsur Masyarakat)
 - e) Sifak (Unsur TVRI)
2. Menyetakati dan menetapkan 5 (lima) orang Calon Cadangan anggota Dewas LPP TVRI Periode 2022-2027 sebagai calon pengganti antarwaktu Anggota Dewas LPP TVRI berdasarkan musyawarah untuk mufakat dengan urutan sebagai berikut:
 - a) Setiabudi (Unsur Masyarakat)
 - b) Markus RA Prasetyo (Unsur Masyarakat)
 - c) Zaqia Ramallah (Unsur Masyarakat)
 - d) Muhammad (Unsur Masyarakat)
 - e) Rini Padmirehatta (Unsur TVRI)

Selanjutnya, Pimpinan DPR RI menyampaikan kepada Presiden 5 (lima) nama Calon Anggota Dewan Pengawas Lembaga Penyiaran Publik Televisi Republik Indonesia Periode 2022-2027 yang telah ditetapkan dalam Rapat Paripurna untuk dapat ditetapkan oleh Presiden sebagai Anggota Dewan Pengawas Lembaga Penyiaran Publik Televisi Republik.



Gambar 6 Pimpinan Komisi I DPR RI memimpin jalannya rapat



Gambar 7 Uji Kepatutan dan Kelayakan Calon Anggota Dewas LPP TVRI

C. Panja Pengawasan Komisi I DPR RI

1. Panja BUMNIP

Panja BUMNIP telah melaksanakan Rapat-rapat sebagai berikut:

- a) Rapat Intern tanggal 16 Januari 2023 dalam rangka menyusun agenda kegiatan Panja BUMNIP.

- b) RDP dengan Dirjen Renhan Kemhan, Asrenum Panglima TNI, Asrena KASAD, Asrena KASAL, dan Asrena KASAU tanggal 28 Maret 2023, dalam rangka mengetahui:
- 1) Kebijakan strategis Indhan yang mampu menciptakan iklim kondusif bagi pengembangan Indhan nasional,
 - 2) Kinerja holding BUMN Indhan untuk kepentingan bangsa dan negara,
 - 3) Urgensi revitalisasi Indhan menuju Indhan yang unggul dan yang berdaya saing,
 - 4) Tinjauan Indhan dari sisi SWOT dan/atau SWOC, dan
 - 5) Pendanaan untuk biaya investasi Indhan yang berdaya saing.



Gambar 9 Bapak Utut Adiando memimpin jalannya RDP Panja BUMNIP

Gambar 8 Mitra Kerja dalam RDP Panja BUMNIP

Selain rapat-rapat yang telah dilaksanakan, Panja Panja BUMNIP Komisi I DPR RI tanggal telah melaksanakan Kunjungan Kerja tanggal 6 – 8 April 2023 dalam rangka mengetahui:

- a) Kebijakan strategis Indhan yang mampu menciptakan iklim kondusif bagi pengembangan Indhan nasional,
- b) kinerja holding BUMN Indhan untuk kepentingan bangsa dan negara,
- c) urgensi revitalisasi Indhan menuju Indhan yang unggul dan yang berdaya saing,
- d) tinjauan Indhan dari sisi SWOT (*Strengths, Weaknesses, Opportunities, Threats*) dan/atau SWOC (*Strengths, Weaknesses, Opportunities, Challenges*); dan
- e) pendanaan untuk biaya investasi Indhan yang berdaya saing,

ke daerah sebagai berikut:

- a) Provinsi Jawa Barat, Bandung;



Gambar 11 RDP dengan Dirut PT. DI



Gambar 10 RDP dengan Dirut PT. DI

- b) Provinsi Jawa Barat, Subang.



Gambar 13 Delegasi Komisi I DPR RI ke PT. Dahana, Tbk.



Gambar 12 Penyerahan Plakat oleh Bpk. Sturman Panjaitan

D. Kunker Komisi I DPR RI

1. Kunker Spesifik tanggal 16 – 18 Maret 2023 ke daerah:

- a) Provinsi Kepulauan Riau (Batam) dalam rangka mengetahui Deteksi dini dan cegah dini tahapan pelaksanaan Pileg & Pilpres 2024; Deteksi dini dan cegah dini terhadap intoleransi, paham radikalisme, dan kegiatan terorisme; dan Deteksi dini dan cegah dini situasi terkini;
- b) Provinsi Lampung dalam rangka mengetahui Deteksi dini dan cegah dini tahapan pelaksanaan Pileg & Pilpres 2024; Deteksi dini dan cegah dini

terhadap intoleransi, paham radikalisme, dan kegiatan terorisme; dan Deteksi dini dan cegah dini situasi terkini;

- c) Provinsi Riau, Pekanbaru dalam rangka Kesiapan Binda Riau dalam melaksanakan Deteksi dan Cegah Dini tahapan pelaksanaan Pileg dan Pilpres 2024; Deteksi dan Cegah Dini terhadap intoleransi, paham radikalisme, dan kegiatan terorisme di Provinsi Riau; dan Deteksi Dini dan cegah dini situasi terkini di Provinsi Riau;
- d) Provinsi Jawa Tengah, Semarang dalam rangka Mewujudkan Edukasi Politik Masyarakat terkait Persiapan Pemilu 2024;



Gambar 14 Delegasi Komisi I DPR RI ke Semarang



Gambar 15 Penyerahan Plakat oleh Pimpinan Komisi I DPR RI

- e) Provinsi Jawa Tengah, Solo dalam rangka untuk mengetahui:
 - 1) Kesiapan PT. Sri Rejeki Isman, Tbk. (Sritex) dalam memenuhi kebutuhan sarana prasarana TNI;
 - 2) Strategi korporasi PT. Sri Rejeki Isman, Tbk. (Sritex) dalam perluasan lini bisnis di pasar global.



Gambar 17 RDP dengan PT. Sri Rejeki Isman, Tbk. (Sritex)



Gambar 16 Delegasi sedang Meninjau Produk PT. Sritex

2. Kunker Reses

Dalam rangka melaksanakan fungsi pengawasan terhadap kinerja Mitra Kerja Komisi I DPR RI di daerah, pada Reses Masa Persidangan IV Tahun Sidang 2022-2023 melakukan pengawasan pada tanggal 14 – 17 April 2023 ke daerah sebagai berikut:

- a) Provinsi Jawa Barat, Bandung, dalam rangka untuk mengetahui Persiapan KPID dalam mengawasi isi siaran Pemilu 2024 Kolaborasi dalam pengawasan isi siaran antara KPID dengan KPUD dan lembaga terkait lainnya;



Gambar 19 Penyerahan plakat oleh Ibu Nurul Arifin



Gambar 18 Rapat Dengar Pendapat dengan Gubernur Jawa Barat

- b) Provinsi Jawa Barat, Bogor, dalam rangka untuk mengetahui Kesiapan Korem 061/ Suryakencana dalam melaksanakan tugas Operasi Militer Perang dan Operasi Militer Selain Perang dengan dukungan alutsista, personil, sarana dan prasarana serta kesejahteraan prajurit.



Gambar 21 RDP dengan Danrem 061/Suryakencana



Gambar 20 Pimpinan Delegasi sedang membacakan kesimpulan RDP

- c) Provinsi Banten, Serang, dalam rangka untuk mengetahui Persiapan KPID dalam mengawasi isi siaran Pemilu 2024 Kolaborasi dalam pengawasan isi siaran antara KPID dengan KPUD dan lembaga terkait lainnya.



Gambar 23 Wakil Ketua Komisi I DPR RI sedang melakukan pendalaman



Gambar 22 Penyerahan plakat oleh Perwakilan Komisi I DPR RI

3. Kunjungan Luar Negeri

Dalam rangka Pengawasan Komisi I DPR RI terhadap Mitra Kerja Komisi I DPR RI di luar negeri, yaitu Perwakilan RI di Luar Negeri terkait pelaksanaan kebijakan Pemerintah dan APBN serta pelaksanaan tugas Duta Besar dan Perwakilan R.I., yaitu ke:

a) Hungaria (Budapest) pada tanggal 5 – 11 Mei 2023;



Gambar 24 Penyerahan plakat oleh Bapak Abdul Kharis Almasyhari



Gambar 25 RDP bersama Duta Besar RI untuk Hungaria di Budapest

b) Portugal (Lisbon) pada tanggal 9 – 15 Mei 2023;



Gambar 27 RDP dengan Duta Besar RI untuk Portugal di Lisabon



Gambar 26 Foto bersama di Wisma KBRI di Lisabon

c) Spanyol (Madrid) pada tanggal 9 – 15 Mei 2023.



Gambar 28 Delegasi Komisi I DPR RI sedang melakukan pendalaman



Gambar 29 RDP Komisi I DPR RI dengan Dubes RI untuk Spanyol di Madrid

IV.PENUTUP

Demikian Laporan Kegiatan Komisi I DPR RI pada Masa Persidangan IV Tahun Sidang 2022-2023.

Jakarta, 15 Mei 2023
KABAGSET. KOMISI I DPR RI,

SARTOMO, S.S., M.Si.
NIP. 196808111996031001